

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pangerang Moenta, 2017, *Permusyawaratan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan*, Intelegensia Media:Malang.
- Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press:Malang.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispuredence) Vol. I Pemahaman Awal*, Prenadamedia Group:Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education:Yogyakarta.
- Agus Riwanto, Et.Al, 2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu:Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media:Makassar.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP:Yogyakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya:Bandung.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group:Jakarta.
- , 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group:Jakarta.
- , 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press:Malang.
- , Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, 2020, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Litera:Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno, 2019, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia:Jakarta, Cetakan Kesepuluh.
- Gunawan Suswanto, 2016, *Mengawal Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Penerbit Erlangga:Jakarta Timur.
- I Dewa Gede Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press:Jakarta.

- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media:Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, Memahami Etika Profesi & Pekerjaan, Penerbit Pustaka Yustisia:Yogyakarta.
- Jimly Assididqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI:Jakarta.
- , 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI:Jakarta.
- , 2017, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang *'Rule of law dan Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Kemitraan Partnership, 2011, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan:Jakarta Selatan, September.
- Lukman Hakim, 2012, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Setara Press:Malang.
- M. Afifuddin, 2020, Membumikan Pengawas Pemilu Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari dalam, PT. Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Mahfud MD, 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.
- Martin Basiang, 2016, *Law Dictionary second Edition*,PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2019, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi,Prima Grafika:Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, 2004, Negara Hukum Studi tentang Prinsip-Prinsipnya di lihat dari Segi Hukum Islam, implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,Kencana:Jakarta.
- Muhtar Said, 2019, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media:Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum, Prenadamedia Group:Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group:Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, Balai Pustaka:Jakarta.
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Kemitraan Partnership:Jakarta.
- Ridwan HR. 2011, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers:Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet.13), Rajawali Pers:Jakarta.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Prenadamedia Group:Jakarta.
- Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, 2016, Etika Profesi Hukum, CV. Andi Offset:Yogyakarta.
- Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenadamedia Group:Jakarta.
- W.JS. Poerwadarminta (diolah kembali Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional., Ed), 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, Balas Pustaka:Jakarta.
- Wiryanto, 2019, Etika Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan, PT. RajaGrafindo Persada:Depok.
- Yopi Gunawan & Kristian, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila, PT Refika Aditama:Bandung.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.

JURNAL

- Didik Sukriono, 2009, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI.
- Frans Magnis Suseno, 2015, Mengelola Negara Secara Etis, dalam Hermansyah Et.al (Ed), Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI:Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2015, Menggagas Peradilan Etika di Indonesia, dalam Hermansyah Et.al (Ed), Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI:Jakarta.
- Muh. Hasrul, 2017, Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Jurnal Perspektif:Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 22 Nomor 1, Wijaya Kusuma Universitas Surabaya.
- Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, 2018, Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi (Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:Jakarta.

Fritz Edward Siregar, 2019, "*Penegakan Etika Bagi Pengawas Pemilu Ad hoc*", dalam Ahsanul Minan (Ed) Perihal Penegakan Hukum Pemilu (serial evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019), Bawaslu RI:Jakarta.

Ratna Dewi Pettalolo, 2019, Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dalam Ahsanul Minan (Ed), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu:Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, Pedoman Organisasi & Tata Laksana MKEK, Hasil Mukhtamar Ikatan Dokter Indonesia XXX

WEBSITE

<https://dkpp.go.id/prinsip-prinsip-peradilan-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>. diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc> Diakses pada tanggal 12 November 2021

<https://bawaslu.go.id/id/berita/penanganan-etik-penyelenggara-ad-hoc-dewi-usul-sinkronisasi-perbawaslu-pkpu-dan-peraturan>. Diakses pada tanggal 13 November 2021